

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan berganti menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diberi kebebasan dalam mengatur daerahnya sendiri. Kekuasaan pada Pemerintah daerah ini dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah dilakukan karena adanya peralihan kewenangan dari pusat ke daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengurus daerah otonomnya sendiri. Kekuasaan ini membuat pemerintah berupaya agar masyarakat setempat menjadi aman, makmur dan sejahtera. Upaya ini dituangkan pada masing-masing program pemerintah Kabupaten/Kota dengan harapan agar target yang diinginkan dapat tercapai.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang diberi amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah digolongkan dalam entitas pelaporan dimana setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban selama periode jabatannya. Salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ialah laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan daerah sendiri ditujukan untuk menilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil atau tidak dalam menjalankan tugasnya dengan baik selama jabatannya. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik, yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan pemerintahan yang bersih. Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Untuk dapat mengelola keuangan daerah secara baik, Pemerintah Daerah memerlukan instrumen dan aturan mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah itu sendiri. Instrumen dan aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi. Letak Provinsi Jambi berada di Pulau Sumatera dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau. Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin.

Tahun 2016, Kota Jambi meraih penghargaan Government Award untuk kategori “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Hal ini suatu kesuksesan yang diraih oleh Pemerintah di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi. (Jambiexpres.co.id)

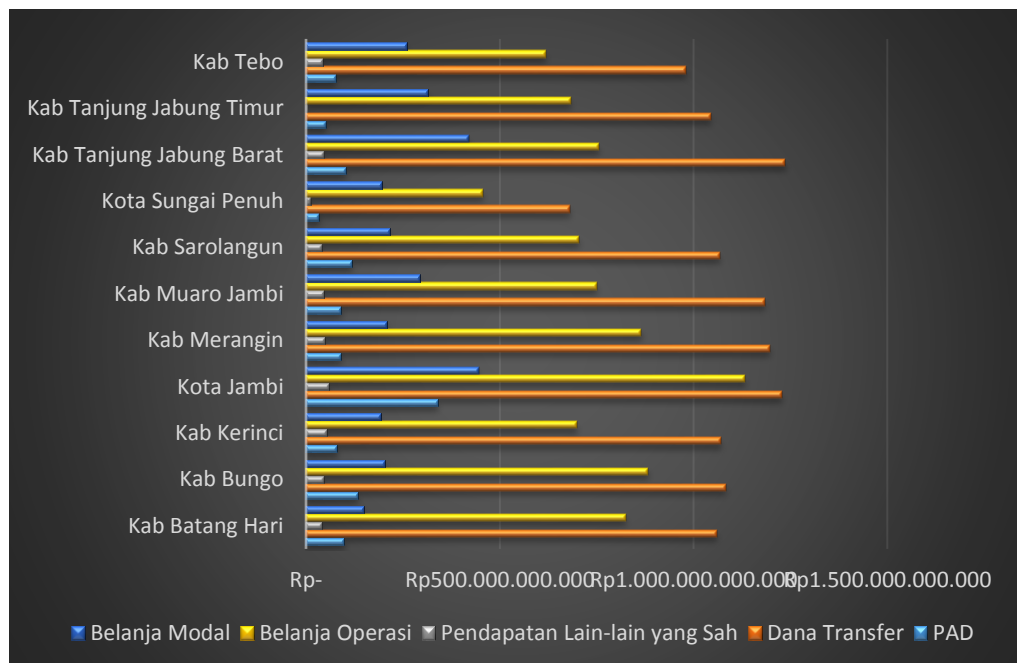
Disisi lain, pada tahun 2017, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kendala dalam realisasi Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dana ini digunakan untuk pembangunan berupa pembangunan jalan, jembatan dan air bersih. Pada tahun yang sama, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami kendala dalam penyerapan APBD. Hingga awal September 2017, APBD Kabupaten Tebo hanya mampu menyerap dana APBD sebesar 51%, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 47%. Pada akhir tahun, Kabupaten Kerinci mengalami penurunan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya pada anggaran pariwisata. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu branding wisata di Provinsi Jambi sehingga perlu diperhatikan agar perkembangan lokasi wisata dapat optimal. Selain itu, belanja modal atas pembangunan bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) tidak berdampak positif pada masyarakat. Pasalnya pembangunan yang dilakukan pada tahun 2016, mengalami jebol yang cukup parah pada akhir Desember 2017. (Jambiexpres.co.id)

Dari permasalahan tersebut merupakan gambaran atas kinerja yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan dilakukannya evaluasi sehingga pada periode selanjutnya, kesalahan atau kendala tersebut tidak terulang kembali.

Kinerja dapat dikatakan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi pada periode tertentu. Jika kinerja suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, maka tujuan yang ingin dicapai akan terealisasi sesuai yang diharapkan. Kinerja dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaporkan pemerintah daerah setiap satu tahun anggaran.

Laporan keuangan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing pemerintahan. Program yang akan dilakukan umumnya direncanakan beserta anggaran yang akan digunakan dengan jangka waktu satu tahun. APBD ini memuat berupa pendapatan daerah dan belanja daerah yang terjadi pada pemerintah daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berikut gambaran pendapatan daerah pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2018.



Sumber: BPK RI, 2020

Gambar 1.1
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Dari grafik tersebut, diketahui nilai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi atas program yang dijalankan pada masing-

masing pemerintah daerah tersebut. Selain itu, tingkat tertinggi pada grafik dimiliki oleh Dana transfer dan disusul Belanja Operasi.

Berdasarkan pengamatan pada grafik tersebut, dapat ditarik beberapa hal tentang kondisi keuangan yang ada pada laporan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Tentunya kondisi ini akan berpengaruh pada Kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut. Kondisi keuangan yang dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan pada Kabupaten/Kota didominasi pendapatan transfer sehingga akan berdampak pada kemandirian daerah.
2. Efektivitas dan efisiensi atas penerimaan dan pengeluaran daerah perlu dikaji.
3. Keserasian antara belanja operasi dengan belanja modal perlu dikaji untuk melihat sudah tepatkah dalam APBD tersebut.

Umumnya, suatu daerah menginginkan daerahnya tumbuh mandiri sehingga dapat membiayai seluruh kegiatan pemerintahannya sendiri. Dalam penerimaan dan pengeluaran perlu dilihat tingkat efektif dan efisien agar diketahui ketepatannya sehingga pencapaian suatu target dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terdapat opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diberikan ketika laporan tersebut telah diperiksa oleh BPK. Opini yang diberikan BPK ialah berupa pendapat atas LKPD yang dilaporkan pemerintah daerah selama satu tahun. Opini ini dapat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut tabel opini BPK tahun 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Kabupaten Batang hari	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Kerinci	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Tebo	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP
Kota Jambi	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Sarolangun	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	WDP	WTP	WTP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	TMP	WDP	WTP
Kota Sungai Penuh	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Bungo	WDP	WDP	WTP
Kabupaten Merangin	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK Jambi, 2020

Tabel ini menunjukkan bahwa perkembangan opini yang diberikan BPK terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tergolong baik, namun ada beberapa Kabupaten yang mendapat opini yang kurang memuaskan pada tahun 2016 dan 2017. Perkembangan ini akan menjadi tolak ukur atas keberhasilan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Menurut Abdul Halim (2012:230), “Salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan pemerintahan daerah”. Pengukuran kinerja pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisien Belanja, dan Rasio Pertumbuhan. Pengukuran ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wita Liantino dan Lazyra KS..

Penelitian terdahulu mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Joko Pramono (2014) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta masih kurang pada aspek kemandirian dan keserasian, sedangkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta sudah baik pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan kemampuan membayar pinjaman. Penelitian Sudirman dan Susilawati (2018) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi Jambi tergolong sangat efektif, rasio kemandirian sangat ketergantungan

pada pusat, pertumbuhan sangat efektif karena mengalami peningkatan. Penelitian Lazyra KS (2016) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan pada Kota Medan mengalami penurunan dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan, kemandirian masih kurang, belum efektif dalam pencapaian target penerimaan pendapatan, dan kurang efisien dalam belanja daerah.

Penelitian Wita Liantino (2018) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan di Kota Surakarta kurang baik, mulai kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian hingga pertumbuhan yang rendah. Penelitian Herry Goenawan Soedarsa (2020) pada Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa rasio kemandirian tergolong instruktif, rasio efektivitas tergolong sangat efektif, rasio efisien tergolong belum efisien, dan share dan growth APBD menunjukkan sumbangan PAD rendah namun pertumbuhan PAD tinggi. Penelitian Juddy Julian Pilat, dkk (2017) menyatakan bahwa kemampuan kota Manado masih belum ideal, kemandirian sangat rendah, dan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tergolong efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu mengenai PAD yang dilakukan oleh Yunus Harjito, dkk (2020) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, DAK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, DAU tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Penelitian Ade Pipit Fatmawasti, dkk (2019) menyatakan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial antara PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah berpengaruh secara signifikan, hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Pada Dana Perimbangan, hasil uji hipotesis secara parsial berpengaruh secara signifikan dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Penelitian Anis Feblin, dkk (2020) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah mampu mengolah keuangannya secara mandiri dan sangat efektif, belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan efektif dalam pembelanjaan namun tidak efektif dalam pembangunan dan

penelitian Halkadri Fitra, dkk (2020) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok menyatakan bahwa kemandirian dan derajat desentralisasi sangat kurang, ketergantungan daerah sangat tinggi, efektivitas total pendapatan dan PAD tergolong efektif, serta realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja dan efisien total belanja tergolong kurang efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi**”. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dengan objek penelitian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Keserasian?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Total Pendapatan?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan PAD?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah yang dilihat dari aspek Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas Total Pendapatan,

Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

2. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi sebagai entitas pelaporan pemerintah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Kekeragaman.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bila diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan PAD.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis bagi pihak - pihak tertentu. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan tentang potensi yang ada di Provinsi Jambi untuk dikembangkan dengan baik.

- b. Sebagai bahan masuk kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dalam mempertanggungjawabkan dana publik yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Dapat memberikan masukan kepada penulis lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.